

**ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DI KELURAHAN DINOYO KOTA MALANG**

**Adrian
Soekarno**

Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Abstrak: Konsep pemerintahan yang baik digunakan sebagai kerangka kerja kelembagaan untuk memperkuat otonomi desa. Kenyataannya adalah praktik tata kelola yang baik dalam praktik pengelolaan lebih banyak dana diarahkan ke pemerintah pusat, bukan untuk publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bentuk dan praktik tata kelola yang baik pengelolaan dana desa yang transparansi, Akuntabilitas dan responsif. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan fenomenologis untuk mengeksplorasi penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa. Studi ini menemukan bahwa implementasi pengelolaan dana desa di desa/kelurahan Dinoyo secara normatif sesuai dengan mekanisme tata kelola yang baik meskipun masih ada beberapa kelemahan dalam penerapannya di lapangan. Implikasi kebijakan dari penelitian ini dapat digunakan untuk menilai implementasi tata kelola yang baik di lembaga pemerintah desa khusus dalam pemerintahan desa.

Kata Kunci: Dana Desa, *good governance*, Transparansi, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mampu mengelola apa yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya peranan desa sebagai langkah awal terbentuknya kemandirian masyarakat membuat Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang didalamnya menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan memberikan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk setiap tahun anggaran yang tujuannya diperuntukkan bagi desa. Dari bentuk bantuan inilah yang kemudian melahirkan program dana desa yang tercetus di tahun 2015, sementara pengertian dan tujuan tata kelola keuangan desa sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan

desa adalah keseluruhan dari semua kegiatan pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari program dana desa tersebut Pemerintah Pusat memiliki harapan kepada Pemerintah Daerah untuk mampu memaksimalkan dan mengelola dana desa dengan baik supaya dapat mewujudkan pemerintahan yang mampu mengelola infrastruktur berdasarkan prioritas anggaran yang telah diajukan (Warta Pengawasan, 2015: 5).

Dalam proses pencapaian tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa yang baik dan bersih, masih didapati beberapa isu strategis dalam sebuah tata kelola keuangan, apabila dilihat dari beberapa media informasi. Sektor keuangan pemerintahan desa dinilai masyarakat belum mampu untuk menerapkan prinsip pengelolaan organisasi yang sesuai dengan harapan (Irawan, 2017: 43).

Permasalahan terletak pada tata kelola organisasi pemerintahan yang sampai saat ini belum mampu menerapkan konsep yang kuat dalam implementasi menjaga penggelolaan kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan untuk dapat menerapkan prinsip pengelolaan organisasi yang baik diperlukan konsep yang mampu membantu untuk memperbaiki salah satunya adalah konsep *Governance* (Duadji, 2013).

Dalam rangka untuk mendukung terwujudnya sebuah tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam hal penyelenggaraan yang dilakukan dilingkup sebuah organisasi, pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparansi, akuntabel dan responsive serta dilakukan sesuai aturan dan disiplin anggaran yang telah ditentukan. Pendekatan sistem organisasi yang dilakukan dengan sesuai konsep teori organisasi akan menghasilkan tujuan yang mampu untuk memahami fenomena *governance* yang bisa dinyatakan dalam

bentuk persepsi dan mampu diklasifikasikan sebagai sebuah sistem hierarki yang mampu menjelaskan beberapa kondisi secara keseluruhan dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi yang baik (Tricker, 2009).

Dilihat dari penelitian terdahulu, masih banyak pula ditemukan kendala-kendala yang dialami beberapa desa seperti: penerapan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa yang tidak optimal yang secara keseluruhan kebanyakan hanya mencakup aspek fisik yang berdampak kurangnya pemberdayaan kepada masyarakat seperti pengadaan ketahanan pangan dan pengembangan social budaya yang seharusnya dapat mencakup belanja fisik dan belanja non fisik (Irma, 2015). Apabila dilihat dari fenomena penelitian terdahulu lainnya, pemerintah seharusnya mampu untuk memberikan kewenangan dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan dana desa untuk memberikan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat serta memberikan hak kepada masyarakat untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan desa yang merupakan aspek penting dalam menciptakan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan keuangan desa (Astuti, 2016).

Dari beberapa pandangan, pemikiran dan asumsi-asumsi yang telah terbangun dalam uraian diatas, masih banyak beberapa persoalan yang sangat perlu untuk dikaji lebih mendalam. Karena pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa yang dilakukan di seluruh desa di Indonesia, nantinya akan memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Sesuai dengan penelitian terdahulu Akuntabilitas adalah sebuah tindakan kewajiban yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait kejelasan sebuah fungsi, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi yang telah terlaksana (Efendi, 2009: 5).

Dari beberapa gambaran kecil fenomena permasalahan yang didapat dari observasi maupun penelitian terdahulu terkait pengelolaan dana desa, munculah ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih lanjut terkait persoalan dari pengelolaan dana desa yang nantinya akan difokuskan dan dititik beratkan pada proses pengelolaan dana desa terhadap alokasi dana desa yang akan dilihat dari sudut pandang akuntabilitas, transparansi dan responsiveness yang sesuai dengan perpektif yang terdapat pada *Good Corporate Governance*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi dan tanpa pengujian hipotesis (Prastowo, 2011: 22). Sedangkan menurut Menurut Bondan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku individu yang akan diamati (Lexy, 2007).

Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala maupun diskripsi tentang suatu fenomena; focus fenomena dan bersifat alami yang mengutamakan kualitas serta disajikan secara naratif. Secara sederhana, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Muri, 2014: 329).

Subjek penelitian ini adalah Kelurahan Desa Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Informan yang menjadi target untuk diwawancarai adalah Tim pelaksana yang terdiri dari: Kepala

Desa, Sekretaris, dan Kepala Seksi – Seksi di Pemerintahan Desa, Sedangkan untuk mengetahui terkait berjalannya pengelolaan dana desa terutama keuangan peneliti akan melakukan wawancara pada bendahara pemerintahan desa, perwakilan dari badan permusyawaratan desa dan perwakilan masyarakat desa untuk mengetahui bagaimana hasil pengelolaan dana desa.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Sugiyono, 2010: 402). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat di kantor Desa/kelurahan Dinoyo terkait dengan pengelolaan dana Desa.

Teknik Analisis Data

Analisa data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisa terhadap data dengan tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga data tersebut dapat bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Teknik analisa data yang digunakan adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan berlangsung. Hal ini berarti bahwa reduksi data telah dilakukan pada saat sebelum pengumpulan data di lapangan, yaitu pada pembuatan/penyusunan proposal, menentukan kerangka konseptual, tempat dan lain sebagainya. Reduksi data dilakukan, sampai dengan penyusunan laporan akhir penelitian (Muri, 2014: 408).

2. Data Display

Kegiatan kedua dalam analisis data model alir ini adalah display data. Display dalam konteks ini merupakan kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data display dalam suatu penelitian kualitatif akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Bentuk yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau (Muri, 2014: 409).

3. Penarikan

Kesimpulan/Verifikasi

Luasnya dan lengkapnya catatan lapangan, jenis, metodologi yang digunakan dalam pengesahan dan pengelolaan data, serta pengalaman peneliti dalam penelitian kualitatif, akan memberikan warna pada kesimpulan penelitian. Hal itu dikarenakan analisis data model interaktif menempatkan peneliti sebagai titik sentral. Reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan harus dimulai sejak awal. Inisiatif berada di tangan peneliti, tahap demi tahap kesimpulan telah dimulai sejak awal (Muri, 2014: 409).

4. Validitas dan Relibilitas Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas kualitatif tidak memiliki konotasi yang sama dengan validitas dalam penelitian kuantitatif, tidak pula sejajar dengan realibilitas (yang berarti pengujian stabilitas dan konsistensi respons) ataupun dengan generalisabilitas, yang berarti eksternal atau hasil penelitian yang dapat diterapkan pada *setting*, orang atau sampel yang baru (John, 2015: 284). Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Relibilitas kualitatif merupakan indikasi terhadap pendekatan yang digunakan oleh

peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain dan untuk proyek-proyek yang berbeda (John, 2015: 285).

Agar dapat menentukan bahwa suatu penelitian kualitatif itu valid dan reliabel, maka peneliti dapat menggunakan beberapa uji, salah satunya adalah dengan menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas merupakan (*credibility*) merupakan salah satu uji yang digunakan untuk menentukan keakuratan, keabsahan dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian kualitatif. Agar penelitian yang dilakukan dapat membawa hasil yang tepat dan benar sesuai konteksnya, maka peneliti dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai cara (Muri, 2014: 394).

5. Melakukan Triangulasi

Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Beberapa cara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan sumber yang banyak dan menggunakan metode yang berbeda. Lebih banyak sumber informasi yang berbeda dalam informasi yang sama dapat menyatakan dua hal, yaitu jumlah eksemplarnya dan berbeda sumbernya dalam informasi yang sama (Muri, 2014: 395).

Penggunaan metode yang berbeda mengartikan bahwa kalau pada tahap pertama informasi dikumpulkan dengan observasi tentang suatu aspek, maka berikutnya gunakan lagi metode yang lain seperti wawancara untuk mengumpulkan informasi yang sama. Jika peneliti belum yakin, maka peneliti harus mencari dan menemukan lagi informasi di dalam dokumentasi tentang aspek yang sama dengan aspek yang dikumpulkan

datanya melalui observasi dan *interview* (Muri, 2014: 395).

Peneliti melakukan triangulasi dengan teknik yang banyak. Peneliti melakukan triangulasi agar data yang diperoleh peneliti dapat menjadi lebih valid dan reliabel. Pada tahap awal, peneliti melakukan pengambilan data dokumen dalam melakukan triangulasi. Peneliti akan banyak mencari data-data tentang proses pengelolaan dana desa dari segi transparansi, akuntabilitas dan *responsiveness* di Desa/kelurahan Dinoyo. Serta peneliti juga akan mencari data informasi yang berkaitan dengan output dari hasil jalannya pengelolaan dana desa melalui sumber komunikasi dengan masyarakat yang berada di dalam wilayah Desa/kelurahan Dinoyo.

Pada tahap kedua, peneliti akan turun ke lapangan untuk melakukan observasi terhadap subjek penelitian, yaitu tim pelaksana pengelola dana Desa. Peneliti akan mencari informasi tentang pengetahuan dari tiap individu tentang pengelolaan dana Desa dari segi transparansi, akuntabilitas dan *responsiveness* di Desa/ kelurahan Dinoyo.

Pada tahap ketiga, peneliti akan melakukan *interview* atau wawancara. Pada tahap wawancara ini, peneliti akan memilih dari beberapa individu yang berada dalam tim pelaksana dengan pemfokusan pada individu yang memiliki peran penting yang berkaitan dengan proses pengelolaan dana Desa.

Pada proses wawancara ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang terstruktur dan tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur merupakan pertanyaan yang telah dirancang oleh peneliti dengan batasan-batasan sesuai indikator yang telah dibuat peneliti. Pertanyaan tidak terstruktur merupakan pertanyaan yang secara spontan dikeluarkan oleh

peneliti sebagai bentuk pendalaman informasi dan data penelitian.

6. Menganalisa Kasus Negatif

Kredibilitas dalam penelitian dapat dipercaya apabila tidak ditemukan lagi hal-hal yang negatif dalam data, baik selama dikumpulkan maupun pada saat analisis dan pemaknaan hasil penelitian. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis kasus *negative* sampai saat tertentu (Muri, 2014: 396).

Peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data-data penelitian yang sudah didapat oleh peneliti baik pada saat data telah terkumpul ataupun pada saat proses pengumpulan data. Pengecekan ulang terhadap data yang terkumpul hanyalah pada data yang bersifat negatif. Maksud dari data penelitian, peneliti mengulang pengambilan data dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang sama dengan situasi dan kondisi pengambilan data sebelumnya.

7. Menggunakan *Reference* yang tepat

Kredibilitas data dan informasi yang dikumpulkan dan ditulis lebih dipercaya apabila dilengkapi dengan bahan-bahan referensi yang tepat. Eisner sebagai ahli yang pertama kali mengusulkan penggunaan referensi yang tepat untuk meningkatkan kredibilitas data yang telah dikumpulkan secara tertulis. Hal ini berarti bahwa peneliti dianjurkan untuk dapat mengumpulkan data referensi yang tepat, baik dengan cara tertulis maupun data hasil rekaman wawancara (Muri, 2014: 397).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. *Good Corporate Governance* Dalam Proses Transparansi

Dalam melaksanakan proses pemerintahan yang baik, pada umumnya setiap lembaga mempunyai prosedur serta tahapan untuk dapat mencapai kinerja yang

maksimal sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun dalam prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa tentunya harus diawali dengan sebuah perencanaan yang baik yang tujuannya untuk membuat kegiatan tersebut terarah dan mampu berjalan maksimal sesuai dengan keinginan pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini menurut informasi yang disampaikan oleh bapak kepala desa di Desa/kelurahan Dinoyo, Kota Malang. Beliau menyampaikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan sampai tahap akhir laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa semua dilakukan secara terbuka dengan memberikan informasi sesuai dengan apa yang terjadi dan sesuai dengan apa yang telah dibahas di awal.

Proses keterbukaan diawali dengan kegiatan musyawarah bersama masyarakat yang diberi nama Musrenbangdes, itu adalah sebuah forum untuk membuat setiap program – program kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah dan tentunya disertai dengan pemberian masukan untuk pemaksimalan kegiatan. Dalam kegiatan itu pula dilibatkan beberapa perwakilan masyarakat desa serta pengawas dari pemerintah daerah dalam menjaga proses pembuatan perencanaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Dari prinsip yang disampaikan oleh bapak Suharno selaku kepala desa, prinsip tersebut itu sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009: 36) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingan bersama. Implementasi program dana desa yang ada di desa/kelurahan Dinoyo juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi partisipasi dalam pembangunan desa.

Hal tersebut juga diperkuat dengan prinsip yang dibuat ibu Irma dalam jurnalnya, beliau berpendapat bahwa

tahap perencanaan harus diawali dengan mengadakan sebuah forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang fungsinya digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membahas usulan rencana penggunaan dana desa, menentukan kebutuhan belanja bagi desa untuk periode ke depan dan untuk mengetahui tentang beberapa hal-hal yang mendesak yang jadi prioritas bagi warga desa untuk segera dilakukan dalam rencana belanja desa (Irma, 2015).

Sedangkan dalam proses pelaksanaannya, dalam hal ini pemerintah desa melibatkan beberapa tim pelaksana serta bekerjasama dengan BPD, LSM dalam memaksimalkan setiap kegiatan yang akan dijalankan. Menurut bapak suharno, tujuan melibatkan beberapa golongan dalam proses pelaksanaan kegiatan di desa tak lain untuk memaksimalkan kegiatan tersebut supaya mampu berjalan dengan baik dan nantinya dapat bermanfaat bagi setiap program lainnya.

Pendapat bapak suharno selaku kepala desa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sulumin dalam jurnalnya, yang mengatakan. Dalam proses pelaksanaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa) semua kegiatan yang melibatkan unsur desa harus dilakukan oleh tim yang profesional dan mampu melakukan tanggungjawab secara maksimal (Sulumin, 2015).

2. *Good Corporate Governance* Dalam Proses Pelaksanaan Akutabilitas

Dalam proses pelaksanaan pertanggungjawaban dana desa, Setiap organisasi yang menerima dana harus mampu memberikan laporan yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan, terlebih pada lembaga pemerintah desa yang telah diberikan dana bantuan yang cukup besar dari pemerintah pusat. Tentunya dari alasan tersebut pemerintah desa harus mampu membuat laporan awal yang tujuannya untuk mencairkan dana desa yang nantinya akan digunakan untuk

menunjang setiap kegiatan yang akan dilakukan.

Dalam hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh bapak Warno selaku bendahara desa, proses pelaporan awal untuk mencairkan dana desa diawali dengan pembuatan proposal awal kegiatan yang didalamnya berisi program kerja dan rencana kegiatan yang telah disepakati saat musyawarah desa.

Kepala Desa dan Bendahara Desa mengambil dana desa dari bank kemudian diberikan kepada Bendahara. Dari Bendahara, selanjutnya diberikan kepada tim pelaksanaan dana desa yang sifatnya untuk alokasi pemerintah desa dan nantinya apabila alokasi tersebut telah terlaksana dana anggaran yang sisa akan dikembalikan lagi ke Bendahara Desa.

Keterlibatan tim pelaksana dan bendahara desa terkait dana anggaran yang begitu besar, tentunya perlu adanya tindak lanjut atau identifikasi dalam setiap laporan yang akan dipertanggungjawabkan. Tentunya pemerintah sebagai pengampu keputusan perlu melakukan upaya untuk dapat memaksimalkan supaya laporan pertanggungjawaban itu baik dan sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan.

Dalam pembahasan sebelumnya yang telah disampaikan oleh kepala desa bapak Suharno yang menyatakan bahwa, Pemerintah telah berupaya untuk memaksimalkan dan berusaha untuk memberikan pertanggungjawaban yang baik dan benar kepada masyarakat desa. Hal tersebut dikuatkan lagi dengan pernyataan bendahara desa bapak Warno yang menyatakan bahwa pembuatan laporan pertanggungjawaban laporan dana desa itu harus melihat kewajaran laporan dari setiap dusun, karena jika tidak disertai ketelitian maka laporan akan terjadi permasalahan di kemudian hari.

Kemudian dalam mendukung proses pertanggungjawaban yang baik dan transparan tentunya pemerintah desa akan semaksimal mungkin memberikan

informasi yang sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan, hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan bendahara desa bapak Warno yang menyatakan bahwa dalam mendukung informasi yang sesuai pemerintah telah menyediakan papan atau mmt pengumuman yang tujuannya untuk memberikan informasi seputar kegiatan dana desa.

Dari beberapa pemaparan informasi yang telah disampaikan oleh bapak Warno selaku bendahara desa, hal tersebut telah menunjukan bahwa pemerintah desa telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyusun atau memberikan informasi seputar anggaran dana desa. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Sulumin yang dituliskan pada jurnalnya yang menyatakan bahwa, pertanggungjawaban merupakan sebuah bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang telah dipercayakan kepada pemerintah desa.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh kajian yang didapat oleh bapak Noverman duadji yang menyatakan bahwa untuk dapat mencapai *good governance* akuntabilitas yang baik maka dasar pilar *good governance* haruslah diimplementasikan dengan baik pula melalui sebuah tindakan yang nyata dalam bentuk revitalisasi, yaitu penginjeksian nilai-nilai *good governance* dalam praktek-praktek penyelenggaraan publik.

3. *Good Corporate Governance* Dalam Proses Responsiveness

Dalam upaya untuk memaksimalkan kinerja pemerintah desa tentunya setiap lembaga organisasi harus mampu memaksimalkan proses daya tanggap terkait kebutuhan yang diinginkan masyarakat, Setiap organisasi ataupun lembaga pemerintah harus mampu memiliki kemampuan yang tujuannya untuk menampung setiap usulan dari program kerja atau pun beberapa bentuk permasalahan yang membutuhkan peran pemerintah.

Dari hasil penelitian yang peneliti temui dilapangan, dalam proses mencapai prinsip responsiveness dalam *Good Corporate Governance* pemerintah desa disini telah berusaha maksimal untuk dapat melayani dan memberikan daya tanggap terhadap kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat desa. Sedangkan dari pemerintah desa sendiri telah memulai dengan beberapa program awal yang tujuannya untuk menjaring semua aspirasi dari masyarakat.

Beberapa bentuk proses daya tanggap pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat diawali dengan program awal musranbangdes yang didalamnya mencakup dan membahas serta mengevaluasi kinerja pemerintah desa dan kebutuhan desa setelah kegiatan berlangsung. Serta sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak suharno peneliti juga diberikan informasi terkait kesiapan serta kemampuan dari aparat desa dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Bentuk usaha dari pemerintah desa hampir sesuai dengan Prinsip partisipasi yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (2009: 36) yang menjelaskan bahwa proses keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi itu sangatlah penting karena hal tersebut menyangkut kepentingan bersama.

Setelah dikira cukup, selanjutnya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pihak BPD. Dalam proses pendampingan dan pengawasan didapati beberapa temuan BPD yang perlu menjadi evaluasi bagi pemerintah desa, bapak singgih menyampaikan bahwa proses pengawasan dilingkup desa masih terbilang belum bisa maksimal dengan dibuktikan dari pasifnya tingkat respon masyarakat terkait pengawasan dana desa. Hal tersebut bisa menjadi ancaman kecurangan terkait anggaran dana desa yang akan dilaksanakan

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ruksamin dan Warsono dalam jurnalnya, permasalahan dalam pengawasan dana desa itu disebabkan oleh keterlibatan masyarakat masih rendah dan perlu adanya mekanisme sosialisasi yang baik yang mampu memberikan informasi terkait kebijakan dana desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti dapat dari beberapa informan yang telah peneliti temui, peneliti akhirnya dapat menarik kesimpulan akhir dari penelitian Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa/kelurahan Dinoyo Kota Malang yaitu, dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa atas alokasi dananya disini pemerintah desa sewurejo telah menerapkan beberapa prinsip *corporate governance* yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas serta responsiveness.

Hal ini dibuktikan dengan adanya proses kegiatan yang telah tersusun dengan melibatkan masyarakat dan bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta beberapa bentuk media informasi untuk menunjang transparansi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Namun dalam proses berjalannya pelaksanaan masih ditemui beberapa kendala yang mempengaruhi proses pertanggungjawaban seperti beberapa laporan yang terlambat, bentuk kegiatan yang tidak sesuai, serta laporan transparansi yang masih belum maksimal.

Maka dari itu dengan melihat dan menganalisis sesuai dengan informasi yang telah peneliti dapat, peneliti akhirnya menyimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan dana desa peneliti menilai bahwa untuk mencapai prinsip *governance* yang baik pemerintah desa/kelurahan Dinoyo harus mampu lebih maksimal dan mengevaluasi setiap program kerja dan

memperbaiki kerjasama dengan masyarakat supaya prinsip *corporate governance* yang diharapkan mampu terpenuhi.

Saran

1. Pemerintah desa sebaiknya melakukan proses koordinasi terlebih dahulu antara pelaksana kegiatan dan masyarakat desa serta sebaiknya lebih meningkatkan program sosialisasi terkait program dana desa supaya masyarakat ikut aktif dalam mengawal proses kegiatan yang berlangsung.
2. Masyarakat desa perlu melakukan sinergi yang lebih baik lagi kepada pemerintah desa dan setiap perangkat desa supaya mereka mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal serta mampu bertanggungjawabkan amanah yang telah diperoleh.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih kuat dalam menggali informasi yang akan mereka cari serta menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk menilai segi pelaksanaan, pertanggungjawaban serta proses pelayanan pemerintah desa dalam kegiatan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar & Usman. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Alam dan Muhammad, N. (2013). Corporate Governance in Islamic Perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance Management*, 6(3), 180-199.
- Astuti. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1, 1-14.
- Budisetyowati. (2014). Prinsip – Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Penelitian Hukum Tarumanegara*, 1-11.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2018). *Aplikasi system tata kelola keuangan Desa*. 08 January 2018. www.bpkp.com.
- Buktupres. (2017). *Transparan Dalam Penggunaan Dana Desa*. 05 February 2018. www.buktupres.com.
- Choudhury., Muhammad, A. (2013). Corporate Governance in Islamic Perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance*, 6(3), 180-199. <http://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2012-0101>.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2017). *Rincian Alokasi Dana Desa*. 05 February 2018. www.djpk.depkeu.go.id.
- Efendi, Arif. (2009). *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Eko, Sutoro., Putra, Surya, Anom., Akhmadin, Maizir. (2016). *Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia: Tanya Jawab Seputar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Desa.
- Hardi, W dan Ruksamin. (2014). The Obstacles of Implementation of Village Allocation Progam in the North Konawe Southeast Sulawes. *Journal of Management and Sustaibility*, 4(3), 1925-4725

Hery. (2013). *Rahasia Pembagian Dividen dan Tata Kelola Perusahaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Indriantoro, nurdan Supomo, bambang (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta : Penerbit BPFE.

Irawan, Nata. (2017). *Tata Kelola Pemerintah Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Irma, Ade. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Selatan Kabupaten Sigi. *e-Jurnal Katalogis*, 3(1), 121-137.